BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Penelitian

Deskripsi objek memaparkan tentang objek penelitian yang mencakup lokasi penelitian, struktur organisasi dari informan yang sudah ditetapkan sekalipun dengan hal lainnya yang mencakup objek penelitian ini. Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis berjudul **Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin**. Dalam hal ini ada tiga dinas yang terkait didalam pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin memiliki peran terbesar dalam pelaksanaan Perwali tersebut. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup ini adalah menyusun suatu progres atau perencanaan dan menerapkan kebijakan dari daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan lingkungan tersebut serta pelayanan dan pengelolaan kebersihan lingkungan di Kota Banjarmasin.

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, yaitu:¹ Visi dari Dinas Lingkungan Hidup ini ialah “Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Banjarmasin Bersih, Indah Dan Nyaman”, begitupun ada salah satu misi nya yaitu mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja biasanya disingkat menjadi Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman di lingkungan. Satuan Polisi pamong praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, untuk menampung berbagai tugas pemerintah daerah.²

Adapun Visi dan Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja ialah “Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Garda Terdepan dalam Penegakkan Peraturan Daerah. Adapun juga salah satu misi nya yaitu menumbuhkan

¹ “Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin,” diakses 10 Mei 2025, <https://dlh.banjarماسinkota.go.id/2017/10/profil-dinas-lingkungan-hidup-kota.html>.

² “Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja,” diakses pada 10 Mei 2025, <https://satpolpp.banjarماسinkota.go.id/p/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja.html#>.

Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.³

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin walaupun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai pelaksana utama dalam Perwali tersebut. Namun, Satpol PP tetap dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya dalam aspek penegakkan peraturan dan pengawasan dilapangan. Keterlibatan Satpol PP biasanya bersifat mendukung dinas teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup, dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pelaku usaha maupun masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan. Satpol PP berperan sebagai bagian dari tim penegakkan Peraturan Daerah, yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan, termasuk larangan penggunaan kantong plastik. Satpol PP dapat melakukan tindakan persuasif hingga penertiban jika ditemukan pelanggaran selama implementasi kebijakan tersebut.

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dalam struktur Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

³ “Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin,” diakses pada 10 Mei 2025, <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html>.

yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, serta kemetrolagian dan standarisasi.⁴

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Perdagangan ini yaitu :

Visi nya ialah “Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi dan berjati diri.” Salah satu misinya yaitu: meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan pelaku usaha.⁵

B. Penyajian Data

Begitupun dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis secara langsung dengan Kabid Tata Lingkungan sekaligus Plt. Kabid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Kasi Penegakkan Satpol PP Kota Banjarmasin dan Kasubag TU UPTD Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Adapun hasil wawancara yang akan diuraikan ke dalam penyajian data ini.

1. Hasil wawancara

a. Informan I

Nama : Dwi Naniek Muhariyani, ST, MT

Jabatan : Kabid Tata Lingkungan dan Plt.Kabid Pengawasan

⁴ “Profil Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin,” diakses pada 10 Mei 2025, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/profil-dinas-perdagangan-dan.html?m=1>.

⁵ “Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin,” diakses pada 2025, <https://disperdagin.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi-dan-tujuan-organisasi.html>.

Umur : 49 Tahun

Hasil wawancara :

Menurut Ibu Naniek⁶ mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berperan penting dalam pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, lebih tepatnya di bidang pengawasan. Peran tersebut meliputi pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun produsen yang mana dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pembinaan membuat produsen dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran terkait pengurangan menggunakan kantong sekali pakai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin membentuk Tim Pengawas dalam mengawasi penggunaan kantong plastik yang bertujuan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan tersebut atau tidak. Tim Pengawas terdiri dari kurang lebih 5 orang yang bertugas untuk mendata dan meedukasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. Beliau juga mengatakan, mendata disini bukan hanya terkait kantong plastik saja, tetapi mendata apakah pelaku usaha itu menggunakan kemasan sekali pakai lainnya seperti sedotan plastik. Mekanisme pengawasan yang diterapkan dengan pelaku usaha, produsen maupun masyarakat dalam pelaksanaan

⁶ Dwi Naniek Muhariyani, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Plt. Kabid Pengawasan , Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 30 April 2025 pukul 16.56 Wita.

Perwali No 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pihak Dinas Lingkungan Hidup cukup mendata dan melakukan pengawasan, karena di perwali tersebut tidak menyatakan sanksi. Jadi pihak Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan pelaku usaha ataupun produsen bisa bekerja sama karena didalam peraturan tersebut tidak membuat sanksi kepada pelanggar.

Adapun kendala utama dan faktor yang menjadi penghambat yang ditemui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dan penegakkan aturan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah dalam management nya sangat susah, karena setiap minimarket memiliki satu management yangmana itu berbeda-beda, klau minimarket itu dipegang oleh satu management yang sama akan mempermudah melakukan pengawasan yang sesuai dengan perwali tersebut dan tidak ada kekuatan yang kuat berupa sanksi yang tegas didalam peraturan perwali ini.

b. Informan II

Nama : Mulyadi, S.AP

Jabatan : Kasi Penegakan Satpol PP

Umur : -

Hasil Wawancara :

Menurut Bapak Mulyadi⁷ beliau mengatakan peran Satpol PP dalam pengawasan pelaksanaan Perwali No.18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin sesuai daripada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah dan peraturan pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, ada tiga tugas yang diemban Satpol PP yaitu Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Pada tugas Satpol PP yang pertama adalah penegakkan Perda dan penegakkan peraturan kepala daerah artinya menyangkut daripada Perwali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, selain SKPD yang terkait yang membidangi dibidang tersebut, Satpol PP juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan Peraturan Walikota Banjarmasin. Mengenai ini, sudah dilakukan sosialisasi oleh Instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang melaksanakan, kalau Satpol PP kebagian daripada penegakkan aturan. Selama dalam waktu beberapa tahun ini memang kurang tersentuh karena tidak ada laporan masyarakat untuk pelanggaran, kalau memang ada pelanggaran yang terjadi, Satpol PP akan menindaklanjuti.

⁷ Mulyadi, Kasi Penegakkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2025, pukul 15.10 Wita.

Kendala yang dihadapi Stpol PP dalam mengawasi pelaksanaan Perwali tersebut menurut beliau sangat banyaknya peraturan daerah Kota Banjarmasin yang mempunyai instansi hukum. Sedangkan personil dari Satpol PP terbatas dan apalagi ditambahnya adanya Perwali. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan dari masyarakat atau instansi terkait yang melaporkan adanya pelanggaran atau mengadu kepada Satpol PP akan mempermudah dan didalam Perwali tersebut tidak ada sanksi tegasnya kepada pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut.

c. Informan III

Nama : Veru Rahadian, S.AP

Jabatan : Kasubag TU UPTD Pasar Sektor II

Umur : -

Hasil Wawancara:

Menurut Bapak Veru Rahadian ⁸mengatakan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengawasan pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin ialah ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi Perwali khususnya dalam mengurangi sampah plastik di

⁸ Veru Rahadian, Kasubag TU UPTD Pasar Sektor II, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, *Wawancara Pribadi*, 22 April 2025, pukul 16.03

Kota Banjarmasin. Sampah yang berbahan plastik itu sangat merugikan bagi lingkungan yang memiliki sifat sulit untuk terurai.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengawasi pelaksanaan Perwali tersebut ialah tidak adanya sanksi tegas dalam Perwali tersebut yang menyebabkan kurangnya penegakkan hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi kebiasaan buruk ini. Apalagi dalam pasar tradisional, sebagian pedagang atau pembeli tidak memungkinkan mengurangi kantong plastik tersebut karena sudah menjadi kebiasaan mereka.

d. Informan IV

Nama : Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup

Jabatan : Anggota tim pengawasan

Hasil Wawancara :

Menurut tim pengawas⁹Peran tim pengawas dalam mengawasi pelaksanaan Perwali ini selain mengawasi tim pengawas melakukan pendataan dan melakukan sosialisasi bahwa adanya Perwali yang mengatakan bahwa mengurangi penggunaan kantong plastik kepada pelaku usaha dan masyarakat. Tim pengawas melakukan pengawasan

⁹ Tim Pengawas, Anggota Tim Pengawas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Mei 2025, pukul 11.02.

rutin dalam satu tahun empat kali untuk menghindari pelanggaran yang ada dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen.

Kendala yang dihadapi dalam Perwali ini adalah dalam Pasar tradisional enggan untuk mengurangi kantong plastik tersebut padahal pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Tim Pengawasan ini sudah pernah melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional seperti Pasar Banjar Raya, Pasar Pekauman, Pasar Pandu, Pasar Cemara, dan Pasar Teluk Dalam dan langsung memberikan bakul purun. Kalau di minimarket itu karena management yang berbeda-beda akan menyusahkan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan. Dalam peraturan tersebut juga tidak ada sanksi hukum yang tegas sehingga masaih ditemukannya pelanggaran.

Tabel 4. 1 Matriks

No.	Nama	Evaluasi Pengawasan	Faktor Kendala
1.	Dwi Naniek Muhariyani, ST.,MT.	1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berperan penting dalam pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan	1. Dalam management nya sangat susah, karena setiap minimarket memiliki satu

		<p>penggunaan kantong plastik, lebih tepatnya di bidang pengawasan. Peran tersebut meliputi pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun produsen yang mana dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pembinaan membuat produsen dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran pengurangan penggunaan kantong plastik.</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin membentuk Tim Pengawas terdiri kurang lebih 5 orang yang bertujuan untuk</p>	<p>management yangmana itu berbeda-beda, kalau minimarket itu dipegang oleh satu management yang sama akan mempermudah melakukan evaluasi dan pengawasan yang sesuai dengan perwali tersebut</p> <p>2. Tidak ada kekuatan yang kuat berupa sanksi yang tegas didalam peraturan perwali ini.</p> <p>3. Setiap minimarket mempunyai management yang</p>
--	--	--	---

		<p>memastikan pelaku usaha mematuhi aturan tersebut bertugas untuk mendata dan meedukasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.</p>	<p>berbeda menyebabkan pengawasan itu mengalami kesusahan.</p>
2.	Mulyadi, S.AP.	<p>1. Selain SKPD yang terkait yang membidangi dibidang tersebut, Satpol PP juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan Peraturan Walikota Banjarmasin khusus nya Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik Mengenai ini, sudah dilakukan sosialisasi oleh Instansti terkait yaitu Dinas</p>	<p>1. Sangat banyaknya peraturan daerah Kota Banjarmasin yang mempunyai instansi hukum. Keterbatasan kurangnya personil dari Satpol PP sangat terbatas dan apalagi adanya Perwali.</p> <p>2. Perwali tersebut tidak ada sanksi tegasnya kepada pelaku usaha yang</p>

		<p>Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang melaksanakan, kalau Satpol PP bagian daripada penegakkan aturan. Selama dalam waktu beberapa tahun ini memang kurang tersentuh karena tidak ada laporan masyarakat untuk pelanggaran, kalau memang ada pelanggaran yang terjadi, Satpol PP akan menindaklanjuti.</p> <p>2. Evaluasi khusus kepada Perwali ini dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk itu akan menjadi bahan untuk Satpol PP. Banyak lapran yang masuk berarti</p>	<p>melanggar aturan tersebut.</p>
--	--	---	-----------------------------------

		<p>banyak pelanggaran terjadi dan dari pengawasan dari Satpol PP sendiri sangat terbatas dan itu terfokus pada satu peraturan.</p>	
3.	Veru Rahadian, S. AP.	<p>1. Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengawasan pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin ialah ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi Perwali khususnya dalam mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin</p>	<p>1. Tidak adanya sanksi tegas dalam Perwali tersebut yang menyebabkan kurangnya penegakkan hukum dan pembinaan terhadap pelaku usaha.</p> <p>2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi</p>

			kebiasaan buruk ini.
4.	Tim Pengawas	1. Selain melakukan, tim pengawas juga melakukan pendataan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat ataupun pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin.	1. Management yang berbeda-beda dalam setiap minimarket. 2. Tidak adanya sanksi tegas dalam perwali tersebut.

C. Analisis Data

1. Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin.

Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 merujuk ke Pengawasan terletak pada Pasal 17 yaitu mengatur tentang pengawasan kebijakan tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup beserta SKPD terkait bertugas melakukan pengawasan terhadap produsen dan

pelaku usaha. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Walikota dapat membentuk sebuah Tim yang terdiri dari anggota SKPD yang relevan. Apabila pengawasan menghasilkan temuan adanya dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha atau pemakai kantong plastik, tindakan selanjutnya dapat diambil sesuai ketentuan yang berlaku. Tim tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan data yang disajikan, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pelaksana utama yang melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha serta masyarakat, termasuk melalui berbagai media dan kegiatan di pasar modern maupun tradisional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan tim pengawasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini sudah berjalan cukup optimal, meskipun ada tantangan dilapangan. DLH sebagai leading sector menjalankan pembinaan dan pengawasan, termasuk sosialisasi, pelatihan, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur DLH, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, sesuai amanat Perwali Nomor 18 Tahun 2016. Mereka memastikan produsen dan pelaku usaha mematuhi aturan pengurangan penggunaan kantong plastik. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ada beberapa kendala, seperti masih perlunya

peningkatan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar. Pengawasan Satpol PP dilibatkan sebagai bagian dari tim pengawasan, berperan dalam penegakkan aturan dilapangan, memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, serta mendukung upaya pembinaan dan tindakan persuasif jika terjadi pelanggaran. Sementara Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan dipusat perbelanjaan dan pasar, serta memastikan para pedagang memahami aturan yang ada.

Perwali ini diterapkan untuk mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan akibat kantong plastik,serta menjamin kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan implementasi kebijakan menurut Riant yang dikutip oleh Joko Pramono menyebutkan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah metode untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tanpa lebih dan tanpa kurang. Kemudian pemerintah kota banjarmasin membuat kebijakan Perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin. Berdasarkan dari pasal yang sudah diteliti maka ditemukan hasil bahwa Pasal 8 kawasan yang harus mengurangi kantong plastik ialah pusat perbelanjaan,pertokoan modern dan minimarket agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, pada Pasal 11 penerpan larangan penggunaan kantong plastik tidak gratis berakhir pda tanggal 31 Mei 2016

dan terhitung tanggal 1 Juni 2016 seluruh ritel toko modern ataupun minimarket dilarang menyediakan kantong plastik menurut perwali ini, Pasal 17 Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang terkait melakukan pembinaan, terhadap pelaku usaha dan produsen dan dalam hasil pengawasan menunjukkan ketidaktaatan dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha dan konsumen. Jadi Walikota memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap yang masih memanfaatkan kantong plastik .Pihak terkait untuk menerapkan Perwali sudah sesuai dengan teori implementasi kebijakan. Implementasi dalam kebijakan Perwali ini menunjukkan kemajuan, namun belum maksimal tetapi telah melakukan upaya seperti sosialisai melalui media dan langsung turun ke lapangan menyampaikan terkait pengurang penggunaan kantong plastik ini kepada pelaku usaha dan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan oleh SKPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan terdapat pelanggaran dalam menggunakan kantong plastik di kawasan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern/ Ritel Modern dan Minimarket Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin serta Satpol PP akan memberikan sanksi administratif hingga paksaan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan pemulihan lingkungan. .

Selain itu, evaluasi kebijakan ini masih terus dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan pelaksanaan agar tujuan pengurangan sampah plastik dapat tercapai. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pengurangan kantong plastik ini sesuai dengan keberhasilan kebijakan publik, menurut teori evaluasi ini bergantung pada keberlangsungan monitoring, efektivitas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiganya merupakan elemen yang saling berhubungan dan bekerja secara menyeluruh untuk menentukan sejauh mana suatu hukum dapat ditegakkan secara efektif. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak berfungsi secara optimal, maka pelaksanaan hukum dalam masyarakat berpotensi mengalami hambatan.

Dari perspektif struktur hukum, yang mencakup lembaga penegak hukum serta pelaksana kebijakan di tingkat lokal, tampak masih adanya kekurangan dalam proses pemantauan dan penegakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Walaupun secara formal institusi sudah terbentuk, penerapannya di lapangan masih belum konsisten dan belum menunjukkan ketegasan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran oleh pelaku usaha.

Ditinjau dari substansi hukum, meskipun aturan tersebut telah secara eksplisit melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, sanksi yang diatur dalam regulasi dinilai belum cukup memberikan efek jera. Akibatnya, para pelaku usaha belum merasa memiliki kewajiban yang kuat untuk mematuhi ketentuan tersebut secara serius.

Sedangkan dari segi budaya hukum, terlihat bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha masih rendah. Kepatuhan terhadap regulasi lebih didorong oleh pengawasan langsung dari pemerintah, bukan atas dasar kesadaran pribadi atau kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik.

Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berjalan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut, baik melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas, penyempurnaan isi peraturan, maupun pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta pelaku usaha.

2. Faktor penghambat masih ditemukannya minimarket di Kota Banjarmasin yang menggunakan kantong plastik tidak ramah lingkungan.

Evaluasi terhadap pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik telah dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, belum tercapainya tujuan

yang diharapkan dalam peraturan tersebut menunjukkan adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi aturan ini, sehingga hasilnya belum optimal.

Kendala yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Tim Pengawas dalam bidang pengurangan penggunaan kantong plastik mereka mengatakan kalau di Minimarket, setiap minimarket memiliki management yang berbeda-beda dan itu sangat menyusahkan dalam melakukan pengawasan. Kalau dari Pasar Tradisional baik pedagang dan pembeli kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut sebab menggunakan kantong plastik menurut pedagang ataupun pembeli itu sangat memudahkan membawa barang belanjaan. Selain itu, kendala atau faktor penghambat yang mereka katakan adalah karena tidak adanya sanksi yang tegas dalam Perwali tersebut. Mereka hanya menghimbau kemudian menegur dan memberi pengertian kepada pelaku usaha agar mematuhi aturan ini.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap Peraturan Walikota ini, di mana mereka mengungkapkan bahwa jumlah personel yang terbatas menjadi salah satu hambatan di lapangan. Oleh karena itu, penerapan suatu peraturan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh sumber daya yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain dari kurangnya personil dalam melakukan pengawasan terdapat juga kendala mengenai tidak adanya

sanksi hukum dalam peraturan tersebut. Mereka hanya bisa melakukan peneguran saja kepada pelanggar peraturan tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, mereka mengatakan kendala utama dalam evaluasi pengawasan Perwali tersebut adalah tidak adanya sanksi hukum yang tegas dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebiasaan yang buruk ini.

Dalam permasalahan ini, kendala manajemen, kurangnya personil, dan lemahnya penegakkan hukum menunjukkan kegagalan dalam implementasi dan pengawasan yang tidak efektif. Tetapi dari aspek evaluasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin, laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Satpol PP menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 belum berjalan optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti penyediaan tas ramah lingkungan di Minimarket dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, namun kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha masih rendah. Hal ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan yang menilai aspek kecocokan, efektivitas, dan efisiensi. Berikut adalah penjelesannya:

- a. Aspek kecocokan menilai apakah sebuah aturan yang telah didapat sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang ada dimasyarakat, serta apakah implementasinya berjalan sesuai tujuan awal kebijakan tersebut. Dalam konteks Perwali ini, kebijakan

pengurangan penggunaan kantong plastik memang sudah relevan dengan kebutuhan untuk mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin. Namun, masih ditemukannya minimarket yang menggunakan kantong plastik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan di atas kertas dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakkan aturan belum berjalan optimal, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Menurut teori evaluasi kebijakan seperti yang dikemukakan William N. Dunn, evaluasi kecocokan juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut perlu diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan jika tidak sesuai dengan kondisi yang nyata. Temuan minimarket yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai menjadi bukti bahwa ada gap antara regulasi dan realitas implementasi. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena kendala di lapangan. Dengan demikian, dari sudut pandang teori evaluasi kebijakan, aspek kecocokan Perwali No.18 Tahun 2016 masih perlu ditingkatkan. Pengawasan harus diperkuat dan pendekatan kepada pelaku usaha perlu diperbaiki agar kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bisa diimplementasikan secara efektif diseluruh lini, termasuk minimarket.

- b. Efektifitas, evaluasi ini menggunakan teori evaluasi kebijakan yang menilai efektivitas sebagai ukuran utama keberhasilan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari data yang diperoleh,

terlihat kebijakan pengurangan kantong plastik di Bajarmasin telah menunjukkan hasil yang positif, seperti penurunan volume sampah plastik secara umum. Namun, temuan masih adanya minimarket yang menggunakan kantong plastik menunjukkan adanya kendala dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan sudah diterbitkan dan memiliki aturan yang jelas, pengawasan terhadap pelaku usaha belum optimal sehingga terjadi pelanggaran yang berulang. Efektivitas tidak bergantung pada isi regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dilapangan. Minimarket yang masih menggunakan kantong plastik mencerminkan lemahnya kontrol dan kurangnya sanksi yang tegas, sehingga kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku usaha. Selain itu, faktor sosialisasi dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha juga menjadi variabel penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan demikian, dari perspektif teori evaluasi kebijakan, efektivitas Perwali No.18 Tahun 2016 masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas penegakkan aturan, serta pendekatan edukatif kepada pelaku usaha. Hanya dengan demikian, tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan di Banjarmasin.

c. Efisiensi dalam konteks ini berarti mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan sumber daya yang minimal dan hasil yang optimal. Berdasarkan data lapangan dan hasil penelitian, implementasi Perwali ini telah menunjukkan upaya yang signifikan, seperti sosialisasi intensif dan pengawasan oleh pemerintah kota serta keterlibatan pelaku usaha ritel besar. Namun, masih ditemukannya minimarket yang masih menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan kepada konsumen. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya pada aspek pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha menengah dan kecil. Dari segi efisiensi, kebijakan ini menghadapi beberapa kendala. Pertama, sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang melakukan pengawasan masih terbatas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh seluruh minimarket. Kedua, belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang efektif menyebabkan pelanggaran dilapangan tidak segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Ketiga, meskipun fasilitas pendukung seperti sosialisasi dan pembinaan telah dilakukan, tingkat kepatuhan pelaku usaha belum merata, terutama di minimarket yang masih menggunakan kantong plastik. Menurut teori efisiensi, kebijakan dapat dikatakan efisien jika output yang dihasilkan (berkurangnya penggunaan kantong plastik) sebanding atau lebih besar

dibandingkan dengan input (biaya, tenaga, waktu) yang dikeluarkan. Dalam hal ini, karena masih ada ditemukan minimarket yang melanggar, maka output yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, sehingga efisiensi kebijakan menjadi kurang optimal. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk pengawasan dan penegakan aturan. Secara keseluruhan, dari perfektif efisiensi, Perwali No. 18 Tahun 2016 sudah berjalan namun belum optimal. Upaya pengurangan penggunaan kantong plastik telah dilakukan, namun masih ada kebocoran pada pelaksanaan di tingkat minimarket. Agar efisiensi kebijakan meningkat, perlu penguatan pengawasan, penambahan sumber daya, serta sistem pelaporan masyarakat yang responsif sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan tujuan kebijakan dapat tercapat dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.

- d. Pemerataan dalam evaluasi kebijakan publik mengacu pada sejauh mana kebijakan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh kelompok sasaran. Pemerataan dalam Perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dapat dilihat apakah seluruh pusat perbelanjaan, toko ritel modern dan minimarket di wilayah Kota Banjarmasin diatur dalam menerapkan larangan penggunaan kantong plastik secara konsisten atau masih ada yang belum mematuhi aturan tersebut. Jika masih ditemukan minimarket yang menggunakan kantong

plastik, berarti aspek pemerataan implementasi kebijakan belum tercapai.

- e. Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan, prefensi, nilai-nilai kelompok sasaran. Kriteria menilai apakah kebijakan ini merespon permasalahan dan aspirasi masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dalam konteks pengurangan penggunaan kantong plastik, responsivitas dapat diukur dari seberapa cepat dan tepat pemerintah menanggapi masukan, keluhan, atau kebutuhan masyarakat terkait implementasi kebijakan, serta apakah kebijakan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada.
- f. Ketepatan berkaitan dengan nilai yang terkandung dalam tujuan suatu program. Kriteria ini menilai apakah tujuan kebijakan benar-benar relevan dan bernilai bagi masyarakat, serta apakah hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, ketepatan dapat dilihat apakah tujuan kebijakan, seperti perlindungan dan kesehatan, benar-benar dihargai oleh masyarakat Banjarmasin.

Teori Pengawasan erat kaitannya dengan evaluasi kebijakan, terutama dalam konteks implementasi Perwali Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Pengawasan merupakan proses sistematis untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sepadan

dengan standar dan sasaran yang telah direncanakan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mendeteksi penyimpangan, mengarahkan perbaikan, serta memastikan akuntabilitas dan kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap aturan yang berlaku. Dalam Perwali tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pusat perbelanjaan, toko ritel modern, ataupun minimarket benar-benar mematuhi larangan penggunaan kantong plastik, serta mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang efektif memerlukan standar yang jelas, penilaian yang konstiten, dan tindakan perbaikan yang tegas. Tanpa adanya sanksi hukum yang tegas dan personil yang memadai, kebijakan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat merupakan bagian penting dari evaluasi responsivitas kebijakan untuk memastikan perubahan perilaku pelaku usaha yang berkelanjutan.

Dalam teori sistem hukum Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini merupakan pilar utama dalam membentuk sistem hukum yang efektif. Ketika salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka implementasi hukum di masyarakat juga akan mengalami hambatan.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang bertugas menegakkan serta mengawasi pelaksanaan hukum. Dalam pelaksanaan Perwali No. 18 Tahun 2016, ditemukan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait. Jumlah petugas pengawas yang terbatas, tidak adanya mekanisme sanksi yang ditegakkan secara konsisten, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama dalam penegakan aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum belum berjalan secara efektif.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada isi, norma, dan ketentuan hukum itu sendiri. Meskipun Perwali ini secara tegas melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di minimarket dan toko modern, namun ketentuan sanksi yang ada dinilai tidak cukup kuat untuk memberikan efek jera. Dalam beberapa kasus, tidak adanya sanksi administratif atau denda yang tegas menyebabkan pelaku usaha merasa tidak terikat secara hukum. Dengan demikian, substansi hukum dalam regulasi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian dan daya paksa hukum.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik menjadi hambatan tersendiri. Banyak pelaku usaha yang masih

menggunakan kantong plastik karena alasan efisiensi dan permintaan konsumen, sementara masyarakat belum terbiasa membawa kantong belanja sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang mendukung regulasi tersebut belum terbentuk secara menyeluruh.